

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori.....	16
2.1.1 Arbitrase	16
2.1.1.1 Pengertian Arbitrase	16
2.1.1.2 Sejarah Pengaturan Arbitrase di Indonesia.....	22
2.1.1.3 Prosedur Beracara di Arbitrase	33
2.1.1.4 Prosedur Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	37
2.1.2 Prinsip Umum Arbitrase dalam Konvensi New York 1958	37
2.1.3 Kekuasaan Kehakiman	40
2.1.4 Upaya Hukum Banding	43
2.1.5 Pengajuan Permohonan	46
2.1.6 Pihak dalam Perkara Perdata	47
2.2 Tinjauan Konseptual	50
2.2.1 Kedudukan Putusan Arbitrase	50

2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Jenis Penelitian	59
3.2 Jenis Data.....	60
3.3 Cara Perolehan Data	63
3.4 Jenis Pendekatan	63
3.5 Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	67
4.1 Hasil Penelitian	67
4.1.1 Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia .	67
4.1.1.1 Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU AAPS.....	67
4.1.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia	71
4.1.2.1 Putusan Pengadilan yang Difokuskan Pada Penggunaan Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase	71
4.1.2.2 Putusan Pengadilan yang Difokuskan Pada Keikutsertaan Lembaga Arbitrase dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	83
4.1.2.3 Putusan Pengadilan yang Difokuskan Pada Upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Membatalkan Putusan Arbitrase	96
4.2 Analisis Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia	108
4.2.1 Dampak Perkembangan Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap Pengaturannya di Indonesia	108
4.2.2 Kekhususan Hukum Acara dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	108
4.2.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	108
4.3 Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan dalam Memutus Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.....	108
4.3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan terkait Penggunaan Alasan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase	125
4.3.1.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU AAPS ...	126

4.3.1.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase Tidak Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS	126
4.3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan terkait Keikutsertaan Lembaga Arbitrase dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	125
4.3.2.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan yang Menerima Keikutsertaan Lembaga Arbitrase	141
4.3.2.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan yang Menolak Keikutsertaan Lembaga Arbitrase	145
4.3.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan terkait Proses Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Membatalkan Putusan Arbitrase	125
4.3.3.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Menolak Banding.....	154
4.3.3.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang Menerima Banding.....	156
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	163
5.1 Kesimpulan	163
5.2 Saran	169
DAFTAR PUSTAKA.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1	Perbandingan Pengaturan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Reglemen Acara Perdata dengan UU AAPS....	109
Tabel 4.2.2	Perbedaan Permohonan dan Gugatan.....	115
Tabel 4.3.1	Putusan-Putusan Pengadilan terkait Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.....	138
Tabel 4.3.2	Putusan-Putusan Pengadilan terkait Keikutsertaan Lembaga Arbitrase dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.....	150
Tabel 4.3.3	Putusan-Putusan Pengadilan terkait Proses Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang Tidak Membatalkan Putusan Arbitrase.....	161